

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian Akuntansi Mudharabah sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu Terisa (2012), dan Gunawan (2012). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Terisa (2012) pada KANINDO (Koperasi Argo Niaga Indonesia) Syariah Jatim menyatakan bahwa pengukuran pembiayaan mudharabah sudah sesuai dengan PSAK 105 yang meliputi bentuk kas di ukur sejumlah uang yang di berikan koperasi pada saat pembayaran dan dalam bentuk non aset di ukur sejumlah nilai wajar pada saat penyerahan. pengakuan pada pembiayaan Mudharabah belum dapat merealisasikan PSAK No. 105 halaman 4 paragraf 14 yang menyatakan bahwa jika nilai investasi Mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah namun diakui sebagai penyisihan piutang tak tertagih dan tidak diakui sebagai kerugian dan tidak mengurangi saldo investasi mudharabah. pengungkapan dan penyajian pembiayaan Mudharabah pada KANINDO Syariah Jatim yaitu Pengungkapan, berdasarkan jenis pembiayaan. PSAK 105 halaman 7

paragraf 36 poin a. Penyisihan kerugian piutang di ungkapkan pada neraca setiap periode pelaporan PSAK 105 halaman 7 paragraf 36 poin b dan c dan Penyajian, di sajikan dalam laporan keuangan sebesar yang telah tercatat PSAK 105 halaman 7 paragraf 34.

Hasil penelitian yang dilakukan Gunawan (2012) pada Bank BTN Syariah Cabang Malang menyatakan bahwa Pengukuran, pembiayaan mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah uang yang diberikan pada saat pembayaran dan dalam bentuk non aset di ukur sejumlah nilai wajar pada saat penyerahan. Penyajian, bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah di perhitungkan dan telah jatuh tempo tetapi belum di serahkan kepada pemilik dana di sajikan sebagai kewajiban dan sistem *sharing* yang digunakan *revenue sharing*. Pengungkapan, pemilik dana mengungkapkan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan yaitu kesepakatan utama usaha mudharabah seperti porsi dana, pembagian usaha, aktivitas usaha mudharabah dan rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya. Namun terdapat ketidak-sesuaian mengenai pengakuan yaitu dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai pembiayaan mudharabah pada saat pembayaran kas atau setara kas kepada pengelola dana sedangkan dalam PSAK dana mudharabah di salurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau setara kas kepada pengelola dana. Akuntansi Mudharabah sepenuhnya sesuai PSAK 105 dengan baik.

B. Tinjauan Pustaka

1. Pembiayaan Mudharabah

a. Pengertian Mudharabah

Salman (2012) Mudharabah berasal dari kata *adhdharby fil ardhi* yaitu bepergian untuk urusan dagang. Disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *al-qardhu* yang berarti potongan, karena pemilik memotong hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan.

Secara teknis mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana kecuali disebabkan oleh *misconduct, negligence*, dan *violation* oleh pengelola dana.

Akad mudharabah merupakan suatu transaksi pendanaan atau investasi yang berdasarkan kepercayaan, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Mudharabah dalam istilah bahasa Inggris disebut *trust financing*, Pemilik dana disebut *beneficial ownership* atau *sleeping partner* dan pengelola dana disebut *managing trustee* atau *labor partner*.

Sedangkan dalam PSAK 105 Mudharabah adalah kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik

dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

b. Dasar hukum

Djamil (2012) secara umum dasar hukum *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha, sebagaimana berikut:

a) Menurut Al-Qur'an

Dan sebagian dari mereka orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah (QS. Al-Muzammil (73):20). Apabila telah ditunaikan shalat maka bertambahlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah (QS. Al-Jumuah (62): 10). Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu (QS. Al-Baqarah (2):198)

b) Menurut Hadist

Diriwayatkan dari ibn Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudharabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikan syarat-syarat tersebut kepada

Rasulullah SAW dan Rasulullah pun memperbolehkannya.
(HR. Thabrani).

Hadist lain, dari Shalih bin Shuhaib ra bahwa Rasulullah SAW bersabda: *tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan, jual beli secara tangguh, muqharadhah/mudharabah dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.* (HR. Ibn Majah).

c. Jenis – jenis akad Mudharabah

Berdasarkan ketentuan PSAK 105 Mudharabah dibagi menjadi tiga jenis yaitu:

- a) Mudharabah Muthlaqah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Kebebasan ini bukan kebebasan yang tak terbatas sama sekali, modal yang ditanamkan tetap tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh islam.

Dalam mudharabah muthlaqah, pengelola dana memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja dalam pelaksanaan bisnis bagi keberhasilan tujuan mudharabah itu. Namun, apabila ternyata pengelola dana melakukan kelalaian atau kecurangan, maka

pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi yang ditimbulkan. Disamping itu, apabila terjadi kerugian, yang bukan karena kelalaian dan kecurangan pengelola dana maka kerugian itu akan ditanggung oleh pemilik dana.

- b) Mudharabah Muqayyadah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau obyek investasi

Batasan – batasan mudharabah muqayyadah :

- Tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya.
- Tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jaminan.
- Mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.

- c) Mudharabah Musytarakah adalah dalam bentuk mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.

Di awal kerjasama, akad yang disepakati adalah akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalannya operasi usaha dengan

pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut. Jenis mudharabah seperti ini adalah perpaduan antara akad mudharabah dan akad musyarakah.

d. Rukun dan Syarat Mudharabah

Djamil (2012) Rukun mudharabah adalah pemodal, pengelola, modal, nisbah keuntungan, dan *shigat* atau akad. Syarat-syarat mudharabah adalah :

a) Pemodal dan pengelola

- Pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum.
- Keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dan *kafil* dari masing-masing pihak.
- *Shigat* yang dilakukan bisa secara eksplisit dan implisit yang menunjukkan tujuan akad.
- Sah sesuai dengan syarat-syarat yang diajukan dalam penawaran, dan akad bisa dilakukan secara lisan atau verbal, secara tertulis maupun ditandatangani.

b) Modal

Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola untuk tujuan menginvestasikannya dalam aktivitas mudharabah. untuk itu disyaratkan harus:

- Dinyatakan dengan jelas jumlah dan jenisnya (yaitu mata uang). Apabila modal berbentuk barang, maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga semasa dalam uang yang beredar (atau sejenisnya).
- Harus berbentuk tunai bukan piutang (namun sebagian ulama membolehkan modal mudharabah berbentuk aset perdagangan, misalnya *inventory*).
- Harus diserahkan kepada *mudharib* untuk memungkinkannya melakukan usaha.

c) Keuntungan

Adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan adalah tujuan akhir mudharabah. keuntungan di persyaratkan sebagai berikut:

- Harus dibagi untuk kedua belah pihak.
- Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam persentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nantinya.
- dituangkan dalam kontrak.
- Waktu pembagian keuntungan dilakukan setelah mudharib mengembalikan seluruh (atau sebagian) modal kepada *shahibul maal*.

- Jika jangka waktu akad mudharabah relatif lama, *nisbah* keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu ke waktu.
- Jika penentuan keuntungan dihitung berdasarkan keuntungan kotor (*gross profit*), biaya- biaya yang timbul disepakati oleh kedua belah pihak, karena dapat mempengaruhi nilai keuntungan.

e. Ketentuan –ketentuan dalam Mudharabah

Djamil (2012) ketentuan –ketentuan dalam mudharabah adalah:

a) Ketentuan Umum Mudharabah.

- Pembatasan waktu mudharabah. beberapa ulama berpandangan boleh melakukan pembatasan mudharabah pada periode tertentu.
- Dilarang membuat kontrak yang tergantung kepada sebuah kejadian pada masa yang akan datang, karena mengandung unsur ketidakpastian.

b) Jaminan Dalam Mudharabah.

Pada dasarnya akad mudharabah adalah akad yang bersifat kepercayaan (*trust*). Karena itu dalam mudharabah menurut sebagian ulama, pemilik dana tidak diperkenankan meminta jaminan sebagaimana jaminan (*rahn*) dalam transaksi utang piutang. Sedangkan menurut sebagian ulama lain, jaminan

dapat diminta oleh pemilik dana / pemodal kepada pihak pengelola dana dan atau kepada pihak ketiga berupa agunan resiko.

Fatwa MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (*Qiradh*) bahwa:

Pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

c) Batasan Tindakan Mudharib Terhadap Dana Mudharabah.

Ada tiga kategori tindakan bagi *mudharib* terhadap dana mudharabah, yaitu tindakan yang berhak dilakukan *mudharib* berdasarkan kontrak, tindakan yang berhak dilakukan *mudharib* berdasarkan kekuasaan perwakilan secara umum, dan tindakan yang tidak berhak dilakukan *mudharib* tanpa izin eksplisit dari penyedia dana.

d) Wewenang Mudharib.

Mudharib bertanggung jawab untuk menangani urusan-urusan yang berkaitan dengan proyek atau kegiatan usaha yang dibiayai dengan pembiayaan mudharabah.

e) Batas Tanggung Jawab Mudharib.

Mudharib tidak bertanggung jawab atas berkurang atau habisnya modal yang diinvestasikan oleh *shahibul maal*. Tanggung jawab *mudharib* hanya terbatas kepada memberikan jerih payah, pikiran, dan waktunya untuk mengurus bisnis yang dibiayai dengan modal *shahibul maal*.

- f) Kewajiban, Hak, dan Tanggung Jawab Shahibul Maal dalam Mudharabah.
- g) Hukum yang menyangkut keuntungan, kerugian, pelanggaran *mudharib*, pembatalan *mudharabah* dan penghentian *mudharabah*.

f. Karakteristik (PSAK 105)

Pada prinsipnya dalam penyaluran *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya akan dapat dicairkan apabila pengelola terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

Pengembalian dana *mudharabah* dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad *mudharabah* diakhiri.

g. Prinsip Pembagian Hasil Usaha (PSAK 105)

Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (omset). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba netto (*net profit*) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah.

Contoh:

Uraian	Jumlah	Metode Bagi Hasil
Penjualan	100	
Harga Pokok Penjualan	65	
Laba Kotor	35	<i>Gross Profit Margin</i>
Beban	25	
Laba rugi bersih	10	<i>Profit Sharing</i>

h. Aturan mengenai Pembiayaan Mudharabah

Salman (2012) Fatwa DSN 07/DSN-MUI/IV/2000 mengatur tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*) . beberapa penjelasan yang terkait dengan pembiayaan mudharabah adalah:

Pertama: Ketentuan Pembiayaan

- a) Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.

- b) Dalam pembiayaan ini Lembaga Keuangan Syariah sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
- c) Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (Lembaga Keuangan Syariah dengan pengusaha).
- d) Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah dan Lembaga Keuangan Syariah tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- e) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- f) Lembaga Keuangan Syariah sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- g) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya

dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

- h) Kriteria pengusaha , prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh Lembaga Keuangan Syariah dengan memperhatikan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional).
- i) Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
- j) Dalam hal penyandang dana (Lembaga Keuangan Syariah) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua: Rukun dan Syarat Pembiayaan

- a) Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
- b) Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.

- Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- c) Modal ialah sejumlah uang dan atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
- Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- d) Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi.
- Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk presentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.

- Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah , dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- e) Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- Kegiatan usaha adalah eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
 - Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariat islam

Ketiga: beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan

- a) Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
- b) Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
- c) Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

- d) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2. Perlakuan Akuntansi Mudharabah PSAK 105

a. Identifikasi akun (sebagai Pemilik Dana)

- a) Mudharabah: adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.
- b) Investasi mudharabah: adalah kas atau aset non kas yang disalurkan oleh pemilik dana kepada pengelola dana sebagai investasi untuk usaha / bisnis yang dilakukan.
- c) Bagi hasil Mudharabah: adalah pembagian keuntungan untuk pemilik dana dan pengelola dana berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad.
- d) Jaminan : adalah aset yang dapat dicairkan oleh pemilik dana apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

- e) Nilai wajar: harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayarkan untuk mengalihkn suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.
 - f) Piutang: adalah jumlah investasi mudharabah yang belum dibayar oleh pengelola dana pada saat akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo.
 - g) Penyisihan kerugian investasi: adalah kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir
 - h) Pengembalian dana Mudharabah: adalah pembayaran kas yang di berikan oleh pengelola dana atas dana yang telah disalurkan oleh pemilik dana.
- b. Pengakuan dan Pengukuran
- Akuntansi untuk Pemilik dana
- a) Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana.
 - b) Pengukuran investasi mudharabah :
 - Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.
 - Investasi dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan:

- Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah.
 - Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.
- c) Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah.
- d) Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.
- e) Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana.
- f) Dalam investasi mudharabah yang diberikan dalam aset nonkas dan aset nonkas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha mudharabah, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil.

g) Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain ditunjukkan oleh sebagai berikut:

- Persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi.
- Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad, atau
- Hasil keputusan dari institusi yang berwenang.

h) Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang.

Penghasilan Usaha

i) Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.

j) Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara :

- a. Investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi.

- b. Pengembalian investasi mudharabah diakui sebagai keuntungan atau kerugian.
- k) Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.
- l) Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah.
- m) Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang.

Akuntansi untuk Pengelola Dana

- a) Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana *syirkah* temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana *syirkah* temporer diukur sebesar nilai tercatatnya.
- b) Jika pengelola dana menyalurkan dana *syirkah* temporer yang diterima maka pengelola dana mengakui sebagai aset.
- c) Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *syirkah* temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik

dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana.

- d) Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana.

Mudharabah Musyarakah

- e) Jika pengelola dana juga menyertakan dana dalam *mudharabah musytarakah*, maka penyaluran dana milik pengelola dana tersebut diakui sebagai investasi mudharabah.

- f) Pembagian hasil investasi mudharabah musytarakah dapat dilakukan sebagai berikut:

- Hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai mudharib) dan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati, selanjutnya bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana (sebagai mudharib) tersebut dibagi antara pengelola dana (sebagai musytarik) dengan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing.
- Hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai musytarik) dan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing, selanjutnya bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana (sebagai musytarik) tersebut dibagi antara pengelola dana

(sebagai mudharib) dengan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati.

g) Jika terjadi kerugian atas investasi, maka kerugian dibagi sesuai dengan porsi modal para musytarik.

c. Penyajian

Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.

d. Pengungkapan

Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada:

1. Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain.
2. Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya.
3. Penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan.
4. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

3. Koperasi

PSAK No. 27, 2007 mendefinikan koperasi sebagai badan usaha yang mengorganisir pemamfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan

kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya. Dengan demikian, koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional.

Sedangkan menurut pasal 1 UU No. 25/1992 yang di maksud dengan koperasi di Indonesia adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan.

Rudianto (2010) Koperasi adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang bertujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka.

a. Karakteristik koperasi

- a) Koperasi dimiliki oleh anggota yang bergabung atas dasar sedikitnya satu kepentingan ekonomi yang sama.
- b) Koperasi didirikan dan dikembangkan berlandaskan nilai-nilai percaya diri untuk menolong serta bertanggung jawab kepada diri sendiri, kesetiakawanan, keadilan, persamaan dan demokrasi. Selain itu, para anggota koperasi percaya pada nilai-nilai etika kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial, dan kepedualian terhadap orang lain.

- c) Koperasi didirikan, dimodali, dibiayai, diatur dan diawasi serta dimanfaatkan sendiri oleh anggota.
- d) Tugas pokok badan usaha koperasi adalah menunjang kepentingan ekonomi anggotanya dalam rangka memajukan kesejahteraan anggota.
- e) Jika terdapat kelebihan kemampuan pelayanan koperasi kepada anggotanya, maka kelebihan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi.

b. Prinsip Koperasi

- a) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.

Karena itu, tidak seorangpun yang boleh dipaksa oleh orang lain untuk menjadi anggota koperasi.

- b) Pengelolaan dilakukan secara demokratis.

Penerapan prinsip ini dalam koperasi dilakukan dengan mengupayakan sebanyak mungkin anggota koperasi di dalam pengambilan keputusan koperasi.

- c) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota.

Koperasi tidak menggunakan istilah laba atau keuntungan untuk menunjukkan selisih antara penghasilan yang diterima selama periode tertentu dengan pengorbanan yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan itu.

selisih ini dalam koperasi disebut dengan Sisa Hasil Usaha (SHU). SHU ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya tertentu akan dibagikan kepada para anggota sesuai dengan perimbangan jasanya masing-masing. Jasa para anggota diukur berdasarkan jumlah kontribusi masing-masing terhadap pembentukan SHU ini. Ukuran kontribusi yang digunakan adalah jumlah transaksi anggota dengan koperasi selama periode tertentu.

d) Pemberian balas jasa yang terbatas pada modal.

Pembatasan bunga atas modal merupakan cerminan bahwa selain menaruh perhatian terhadap pemberian imbalan yang wajar atas partisipasi para anggotanya, koperasi juga mendorong dan menimbulkan rasa kesetiakawanan antar sesama anggota koperasi.

e) Kemandirian.

Agar dapat mandiri, koperasi harus mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Dan agar dapat mengakar kuat, koperasi harus dapat diterima oleh masyarakat. Dan agar dapat diterima oleh masyarakat, koperasi harus memperjuangkan kepentingan serta peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

c. Jenis Koperasi

a) Kopersi simpan pinjam.

Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dana dari para anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota yang memerlukan bantuan dana. Kegiatan utama koperasi simpan pinjam adalah menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman dana kepada anggota koperasi.

b) Koperasi konsumen

Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para konsumen akhir atau pemakai barang atau jasa. Kegiatan utama koperasi konsumen adalah melakukan pembelian bersama. Jenis barang atau jasa yang dilayani suatu koperasi konsumen sangat tergantung pada latar belakang kebutuhan anggota yang akan dipenuhi. Sebagai contoh koperasi yang mengelola toko serba ada, mini market dan sebagainya.

c) Koperasi pemasaran.

Koperasi pemasaran adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para produsen atau pemilik barang atau penyedia jasa. Koperasi pemasaran dibentuk terutama untuk membantu para anggotanya memasarkan barang-barang yang mereka hasilkan.

d) Koperasi produsen

Koperasi produsen adalah koperasi yang para anggotanya tidak memiliki badan usaha sendiri tetapi bekerjasama dalam wadah koperasi untuk menghasilkan dan memasarkan barang atau jasa. Kegiatan utama koperasi produsen adalah menyediakan, mengoperasikan dan mengelola sarana produksi bersama. Tujuan koperasi produsen adalah menyatukan kemampuan dan modal para anggotanya guna menghasilkan barang-barang atau jasa tertentu melalui suatu badan usaha yang mereka kelola dan miliki sendiri.

e) Koperasi Serba Usaha

Koperasi serba usaha adalah koperasi yang memiliki lebih dari satu bidang usaha.

d. Sumber –sumber dana Koperasi

Kasmir (2014) Sumber dana merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan koperasi terutama koperasi simpan pinjam dalam rangka memenuhi kebutuhan dana para anggotanya.

secara umum sumber-sumber dana koperasi adalah:

a) Dari para anggota koperasi berupa iuran wajib, iuran pokok dan iuran sukarela

- b) Dari luar koperasi yaitu Badan Pemerintah, Perbankan dan Lembaga Swasta lainnya.

4. BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*)

a. Pengertian BMT (*Baitul Maal Wat Tanwil*)

Huda & Heykal (2010) *Baitul Maal Wat tamwil* (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri atas dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti: zakat, infaq, dan sedekah. Adapun baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dan berlandaskan islam.

Lembaga ini di dirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank islam atau BPR islam. Prinsip operasinya di dasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli (*ijarah*), dan titipan (*wadiah*).

b. Fungsi BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*)

- a) Penghimpun dan penyalur dana, dengan menyimpan uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit surplus (pihak yang memiliki dana lebih) dan unit defisit (pihak yang kekurangan dana).

- b) Pencipta dan pemberi likuiditas, dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga/perorangan.
- c) Sumber pendapatan, BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya.
- d) Pemberi informasi, memberi informasi kepada masyarakat mengenai resiko keuangan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.
- e) Sebagai satu lembaga keuangan mikro islam yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi UMKMK tersebut

Adapun fungsi BMT di masyarakat adalah:

- a) Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih profesional, *salaam* (selamat, damai, dan sejahtera), dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha (beribadah) menghadapi tantangan global.
- b) Mengorganisasi dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat termamfaatkan secara optimal di dalam dan di luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.
- c) Mengembangkan kesempatan kerja.

d) Megukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota. Memperkuat dan meningkatkan kulaitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial masyarakat banyak.

c. Peranan BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*)

- a) Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat non islam. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi islami.
- b) Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah.
- c) Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memnuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana, dan lain sebagainya.
- d) Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka

pemetaan skala prioritas yang harus di perhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memerhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan juga jenis pembiayaan yang dilakukan.

Selain itu, peran BMT di masyarakat adalah:

- a) Motor penggerak ekonomi dan sosial masyarakat banyak.
 - b) Ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi islam.
 - c) Penghubung antara kaum *aghnia* (kaya) dan kaum *dhu'afa* (miskin).
 - d) Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang *barakah*, *ahsanu 'amala*, dan *salaam* melalui *spiritual communication* dengan *dzikir qalbiyah ilahiyah*.
- d. Prinsip Dasar BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*)

BMT didirikan dengan berasaskan pada masyarakat yang *salaam*, yaitu penuh keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan. Prinsip dasar BMT adalah:

- a) *Ahsan* (mutu hasil kerja terbaik), *thayyiban* (terindah), *ahsanu 'amala* (memuaskan semua pihak), dan sesuai dengan nilai-nilai *salaam* : keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan.
- b) *Barakah*, artinya berdaya guna, berhasil guna, adanya penguatan jaringan, transparan (keterbukaan), dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat.
- c) *Spiritual communication* (penguatan nilai *ruhiyah*).

- d) demokratis,partisipatif, dan inklusif.
- e) Keadilan sosial dan kesetaraan gender, non diskriminatif.
- f) Ramah lingkungan.
- g) Peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya lokal, serta beranekaragam budaya.
- h) Keberlanjutan, memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan diri dan lembaga masyarakat lokal.